

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan baik karena faktor pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor urbanisasi. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini lebih disebabkan oleh tidak seimbangnya peluang untuk mencari nafkah di daerah perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan beberapa riset para ahli transportasi wilayah, mengemukakan bahwa salah satu penyebab mengalirnya penduduk pedesaan ke kota-kota akibat kekeliruan adopsi paradigma pembangunan yang menekankan pada pembangunan industrialisasi besar-besaran yang ditempatkan di kota-kota besar yang kemudian dikenal dengan istilah *AIDS (Accelerated Industrialization Development Strategy)*, sehingga memunculkan adanya daya tarik yang sangat kuat untuk mengadu nasibnya di kota yang dianggap mampu memberikan masa depan yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih tinggi, sementara pendidikan dan ketrampilan yang mereka miliki kurang memadai untuk masuk di sektor formal (Yunus, 2005).

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, maka kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. Selanjutnya pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya memberikan kontribusi terjadinya lingkungan permukiman kumuh. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh digambarkan sebagai bagian yang terabaikan dari lingkungan perkotaan dimana kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, yang diantaranya ditunjukkan dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sarana

dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat, tidak tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana sosial budaya kemasyarakatan yang memadai. Kekumuhan perumahan dan permukiman cenderung bersifat paradoks, bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut, kekumuhan adalah kenyataan sehari-hari yang tidak mereka masalahkan, sedangkan di pihak lain yang berkeinginan untuk menanganinya, masalah kumuh adalah suatu permasalahan yang perlu segera ditanggulangi penanganannya.

Upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh telah diatur dalam Undang-undang UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, yang menyatakan bahwa untuk mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keandalan bangunan, suatu lingkungan permukiman yang tidak sesuai tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni, dapat ditetapkan oleh pemerintah kota yang bersangkutan sebagai lingkungan permukiman kumuh yang tidak layak huni dan perlu diremajakan.

Penanganan peremajaan lingkungan permukiman kumuh yang diatur dalam Inpres No. 5 tahun 1990, tentang pedoman pelaksanaan peremajaan permukiman kumuh di atas tanah negara dinyatakan bahwa pertimbangan peremajaan permukiman kumuh adalah dalam rangka mempercepat peningkatan mutu kehidupan masyarakat terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang bertempat tinggal di kawasan permukiman kumuh yang berada di atas tanah negara.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum telah mengidentifikasi data kawasan permukiman kumuh di seluruh Indonesia. Setelah identifikasi, kawasan kumuh yang ada yakni sebesar 32.466 hektar yang tersebar di 2.883 kawasan di 415 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dari 415 kabupaten/ kota tersebut, sebanyak 129 kabupaten/kota telah menetapkan kawasan

permukiman kumuh di wilayahnya dengan surat keputusan wali kota/bupati sebagai syarat mendapatkan program pemerintah melalui APBN.

Kota Gorontalo sebagai Ibukota Provinsi yang representatif sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pusat pelayanan pemerintahan di wilayah Gorontalo, merupakan daya tarik (*attracting power*) tersendiri bagi masyarakat sekitar untuk tinggal menetap di daerah ini guna memperoleh kemudahan akses. Hal ini tentunya turut berpengaruh terhadap kebutuhan akan lahan permukiman. Keterbatasan lahan Kota Gorontalo hanya dengan luas 64.79 km terlalu kecil untuk ukuran sebuah ibukota provinsi dan dirasa tidak mampu untuk menahan tekanan pertumbuhan penduduk, baik secara alamiah maupun akibat urbanisasi. Hal ini kemudian memicu tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh baru (*slum area*). Sesuai dengan surat keputusan Walikota Kota, penetapan lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo Tahun 2014 diperoleh total luas 159.1 hektar yang tersebar di 5 kawasan di seluruh Kota Gorontalo. Kawasan Limba B adalah menjadi kawasan wilayah kumuh terbesar yakni sebesar 62.4 hektar dengan tingkat kekumuhan mencapai 60%.

Salah satu parameter penilaian tingkat kekumuhan suatu kawasan perumahan dan permukiman adalah bagaimana kondisi jalan lingkungannya. Berdasarkan hasil observasi awal dan studi terdahulu diperoleh informasi bahwa (a) Cakupan Jaringan (aksesibilitas dan konektivitas) pelayanan jalan di wilayah tersebut masih rendah dan (b) kualitas permukaan jalan yang belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Untuk itu sangat penting artinya penelitian ini dilakukan guna mengatahui permasalahan jaringan jalan di lokasi tersebut guna mengurangi dan memperbaiki tingkat kekumuhan di wilayah tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dengan memenuhi standar yang tepat dan efisien, maka perlu ditunjang pula oleh penyediaan prasarana dan sarana, seperti penyediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Salah satu prasarana penting yang harus disediakan dengan baik dan memenuhi standar adalah prasarana jalan, khususnya jalan di perumahan dan permukiman.

Berdasarkan dari latar belakang masalah, diperoleh informasi awal bahwa sebagian besar status tanah di wilayah penelitian adalah milik Pemerintah Daerah, jalan lingkungan dalam kondisi tanah dan drainase/saluran yang rusak dan tersumbat, tidak adanya MCK dan penanganan persampahan yang belum memenuhi standar kelayakan, sehingga masalah dapat indentifikasi berdasarkan 7 (tujuh) indikator kekumuhan sebagai berikut:

- a. Kondisi Bangunan, ini terbukti dari: (a) Ketidakteraturan bangunan, (b) Tingkat kepadatan bangunan dan (c) persyaratan teknis bangunan yang belum sesuai.
- b. Kondisi Jalan Lingkungan, ini terbukti dari: (a) Cakupan Jaringan (aksesibilitas) pelayanan jalan dan (b) kualitas permukaan jalan yang belum sesuai.
- c. Kondisi Penyediaan Air Minum, ini terbukti dari: (a) Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum dan (b) Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
- d. Kondisi Drainase Lingkungan, ini terbukti dari: (a) Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air, (b) Ketidaktersediaan Drainase, (c) Tidak Terpeliharanya Drainase, (d) Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan dan (e) Kualitas Konstruksi Drainase.
- e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah, ini terbukti dari: (a) Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis, (b) Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis.
- f. Kondisi Pengelolaan Persampahan, ini terbukti dari: (a) Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis, (b) Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis, (c) Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
- g. Kondisi Proteksi Kebakaran, ini terbukti dari: (a) Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif, (b) Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran, (c)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah dan identifikasi masalah, maka masalah penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kondisi kekumuhan di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo?
- b. Bagaimanakah kondisi jaringan jalan lingkungan di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo?
- c. Bagaimanakah penataan jaringan jalan lingkungan dalam upaya meningkatkan meningkatkan kualitas di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kondisi kekumuhan di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo?
- b. Menganalisis kondisi jaringan jalan lingkungan di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo?
- c. Menyusun penataan jaringan jalan lingkungan dalam upaya meningkatkan meningkatkan kualitas di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo?

1.5 Batasan (Ruang Lingkup) Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini dibatasi pada lokasi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, di wilayah administrasi kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Luas areal lokasi penelitian 62,4 Ha, jumlah penduduk 7.546 dengan tingkat kekumuhan mencapai 60% dan tipologi kawasan permukiman berada di tepi air (sungai). Lokasi ini diambil berdasarkan “SK Walikota Gorontalo tertanggal 9 Juni 2014, No. 246/2/VI/2014, tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo.

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi kajian dibatasi pada pada lingkup:

- a. Lingkup pembahasan penelitian adalah tatanan fisik lingkungan yang meliputi prasarana dan sarana dan infrastruktur yang terkait dengan sistem jaringan jalan.
- b. Konsep yang menjadi acuan untuk penataan jaringan jalan diterapkan pada kawasan kajian tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan secara normatif (UU, PP, Perda)

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baik pada masyarakat maupun pemangku kepentingan tentang strategi penataan jaringan jalan lingkungan kawasan kumuh di Kota Gorontalo.
- b. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ilmu dibidang teknik sipil khususnya bidang rekayasa transportasi dalam penataan jaringan jalan di kawasan kumuh.

1.7 Keaslian Penelitian

Penelitian-penelitian yang dilakukan terkait tema dengan penataan jaringan jalan dan permukiman kumuh telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Keaslian dalam penelitian ini dapat dilihat dan dibandingkan dari beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan, yaitu antara lain (1) Ardi (2013) dalam penelitiannya mengemukakan, bahwa peninjauan terhadap hirarki fungsi jalan dan tingkat konektivitas di kawasan perkotaan mempengaruhi layanan jalan dan konektivitas jalan. Aulia (2013) menganalisis kebutuhan jalan di kawasan kota baru, membutuhkan panjang jalan 87,6 km untuk tahun 2011, dan 178,59 km pada tahun 2027 (3) Bedu & Yahya (2010) dalam penelitiannya tentang, menata lingkungan kumuh perkotaan berbasis penataan bangunan dan lingkungan,

menghasilkan model pendekatan kultural & kearifan masyarakat dengan strategi pengembangan revitalisasi.

Berdasarkan uraian berbagai penelitian yang telah dilakukan itu, disimpulkan bahwa; (1) Secara umum (makro) peneliti terdahulu mengkaji pengembangan suatu kawasan untuk kegiatan penggunaan tertentu baik untuk kawasan permukiman, kawasan industri, maupun pengembangan kawasan untuk jaringan jalan, berdasarkan potensi fisik wilayah dan kendala fisik wilayah. Kemudian peneliti tersebut berusaha mencari model atau strategi yang cocok untuk penerapannya, baik untuk permukiman, industri maupun untuk pengembangan jaringan jalan. (2) objek vital yang dianalisis yaitu karakteristik kebutuhan jaringan dan hirarki jalan, (3) formulasi analisisnya terbatas pada pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan studi melalui survei lapangan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah; (1) penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian pentaan jaringan jalan baik sudah ada maupun yang telah direncanakan. (2) Formulasi pendekatan kajian yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) komponen pendekatan, yaitu (a) berdasarkan objek penelitian menggunakan metode survei, dengan teknis pelaksanaannya menggunakan metode observasi dan kuisisioner, terdiri dari variabel kekumuhan dan kebutuhan jaringan jalan, (b) berdasarkan karakteristik populasi, wilayah kumuh di Kelurahan Limba B Kota Gorontalo sebagai sampel lokasi penelitian dan (c) berdasarkan dengan keterkaitan dengan analisis, metode kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menjelaskan tujuan dari penelitian ini.

Beberapa penelitian yang terkait dengan model pengembangan dan daya dukung yang pernah dilakukan dan sedang dilakukan saat ini, dapat ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Keterkaitan Dengan Penelitian Penataan Jaringan Jalan dan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Lokasi, Peneliti dan Tahun	Tujuan	Metode dan Analisa	Hasil Penelitian
1.	Yogyakarta, Ardi (2013)	Peninjauan terhadap hirarki fungsi jalan dan tingkat konektivitas di kawasan perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Komparasi 2. Kuantitatif 3. Kesesuaian 4. Observasi, dokumentasi 5. Proses SIG 	Layanan jalan terdiri fungsi (1) arteri, (2) kolektor, (3) lokal, dan (4) lingkungan. Konektivitas dilokasi tergolong baik dengan nilai Beta 1,5-4,2 dan terbaik dengan nilai Gama 0,5-2,1
2.	Kabupaten Bandung, Aulia (2013)	Menganalisis kebutuhan jalan di kawasan kota baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Deskriptif Kuantitatif & Kualitatif 2. Standar aksesibilitas & mobilitas dari SPM 	Kota baru di Kota Bandung membutuhkan panjang jalan 87,6 km untuk tahun 2011, dan 178,59 km pada tahun 2027.
3.	Kota Makasar, Bedu & Yahya (2010)	Menata lingkungan kumuh perkotaan berbasis penataan bangunan dan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan deskriptif kualitatif 2. Observasi, wawancara & dokumentasi 	Penataan lingkungan di wilayah kasus perlu dilakukan melalui pendekatan kultural & kearifan masyarakat dengan strategi pengembangan revitalisasi.
4.	Kota Gorontalo, Husain (2016)	Mengetahui kondisi kekumuhan & menganalisis kondisi jaringan jalan serta menyusun model penataan jaringan jalan di wilayah studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan deskriptif Kuantitatif & Kualitatif 2. Survei 3. Observasi, kuisisioner, wawancara & dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi kekumuhan terkini 2. Kondisi jaringan jalan terkini 3. Model penataan jaringan jalan di wilayah studi